



**JADI SOROTAN:** Warga melintas di sekitar proyek pembangunan hotel di Jalan Sultan Agung, timur Jembatan Sayidan, Kota Jogja, kemarin (13/8). Proyek ini mendapat sorotan Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) karena dilakukan di tengah pemberlakuan moratorium.

# ISRI Kritisi Pembangunan Hotel di Tengah Moratorium

**Pemkot Jogja Mengklaim Sudah Sesuai dengan Regulasi**

**JOGJA** - Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Jogja menyoroti kembali meraknya pembangunan hotel di tengah pemberlakuan moratorium. Mereka juga mempertanyakan proses pengajuan perizinannya.

Ketua ISRI Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, pihaknya menemukan ada pembangunan hotel besar di Kemantren Pakualaman. Lokasinya berada di timur Jembatan Sayidan. Diketahui, wilayah tersebut masuk dalam kawasan penyangga cagar budaya.

Di samping itu, juga ada pembangunan hotel yang saat ini kembali berjalan setelah lama mangkrak di Kemantren Umbulharjo. Tepatnya di Jalan Kusumanegara yang berlokasi di sisi utara Pertigaan Glagahsari.

Fokki menilai, proses pengajuan izin pembangunan hotel tersebut patut dipertanyakan. Lantaran sampai saat ini masih masuk masa moratorium pembangunan hotel. Selain itu pembangunan hotel juga erat kaitannya dengan gratifikasi. "Masih belum hilang ingatan atas permasalahan gratifikasi oleh wali Kota Jogja yang ditangkap KPK," ujar Fokki dalam keterangannya, kemarin (13/8).

Fokki menegaskan, ISRI Kota Jogja tidak anti terhadap kegiatan investasi. Namun dia mendorong supaya proses pengajuan perizinan harus melalui proses yang benar.

Di samping itu, sesuai peraturan daerah (perda) yang berlaku, berlakunya investasi di Kota Jogja juga harus memaksimalkan tenaga lokal daerah. Sehingga kebermanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dia meminta kepada pihak-pihak terkait untuk meneliti kembali proses perizinan dari investasi yang masuk di Kota Jogja. "Apakah sesuai dengan regulasi atau tidak," imbuh Fokki.

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Jogja Budi Santosa menyampaikan, pembangunan hotel di Kemantren Pakualaman dan Umbulharjo sudah sesuai regulasi. Yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya terbit pada 2020 lalu.

Di samping itu, pembangunan hotel ini juga masuk dalam kategori yang dikecualikan. Sebab merupakan dengan bintang empat ke atas. Itu sesuai Perwal 150/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Jogja No. 85/2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. "Yang diperbolehkan bintang empat ke atas," terang Budi. **(inu/din/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005